

# Konteks Sosial Teun A. Van Dijk pada Mata Najwa “Undang-Undang Cipta Kerja” di *Channel Youtube* Najwa Shihab

Khofifah Firda Purdiana

[khofifahfirda123@gmail.com](mailto:khofifahfirda123@gmail.com)

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, STKIP PGRI Jombang

## Abstrak

Pemberitaan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ramai diperbincangkan dan menjadi polemik dalam masyarakat. Berita ini menjadi sorotan utama dalam media audio-visual ataupun media cetak. Khususnya dalam *channel youtube* Najwa Shihab yang sempat menjadi trending dan banyak penontonnya atas narasi yang membahas ”Undang-Undang Cipta Kerja”. Penelitian ini perlu dilakukan, mengingat banyak masyarakat yang membaca ataupun mendengar suatu wacana tanpa memikirkan bahasa dalam wacana tersebut akan memengaruhi kondisi masyarakat. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, hasil analisisnya berbentuk deskripsi data-data. Data yang terkumpul berupa paparan narasi atau pernyataan dialog dalam program Mata Najwa “Undang-Undang Cipta Kerja” di *Channel Youtube* Najwa Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan oleh pembicara atau narasumber dalam Mata Najwa “Undang-Undang Cipta Kerja” menunjukkan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok. Kekuasaan ini berupa status, pengetahuan, dan sikap yang memengaruhi. Bahasa pembicara menunjukkan akses memengaruhi publik karena pemerintah atau anggota baleg merupakan kelompok yang berkuasa. Adanya penelitian menggunakan analisis wacana kritis diharapkan dapat menumbuhkan sikap kritis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat terkait bagaimana mengkritisi suatu masalah dengan sikap terbuka.

**Kata kunci:** *Analisis Wacana Kritis, Van Dijk, Konteks Sosial, Mata Najwa, Undang-Undang Cipta Kerja*

## Abstract

The news of the ratification of the Omnibus Law was widely discussed and became a polemic in the community. This news became the main focus in audio-visual media or print media. Especially on Najwa Shihab's youtube channel, which had become trending and had a lot of viewers on the narrative that discussed the "Omnibus Law". This research needs to be done, considering that many people who read or hear a discourse without thinking about the language in the discourse will affect the condition of the community. The method used by the researcher is qualitative research, the results of the analysis are in the form of a description of

the data. The data collected is in the form of narrative explanations or dialogue statements in the Mata Najwa program "Omnibus Law" on the Najwa Shihab Youtube Channel. The results of the study indicate that the language used by the speaker or resource person in Mata Najwa's "Omnibus Law" indicates the power possessed by the group. This power is in the form of status, knowledge, and influencing attitudes. The speaker's language shows access to influence the public because the government or members of the legislative assembly are the ruling group. The existence of research using critical discourse analysis is expected to foster a critical attitude towards phenomena that occur in society regarding how to criticize a problem with an open attitude.

**Keywords:** *Critical Discourse Analysis, Van Dijk, Social Context, Mata Najwa, Omnibus Law*

## **PENDAHULUAN**

*Channel* Najwa Shihab merupakan salah satu media sosial *youtube*, akun resmi, dan dibawakan langsung oleh Najwa Shihab menjadi bagian narasi. Kelebihan dari *channel* Najwa Shihab adalah isinya tentang topik-topik politik, hukum, religi, dan isu-isu aktual yang dikemas tidak sekedar menghibur tetapi juga berwawasan mengenai isu mutakhir di Indonesia. Salah satu narasi Mata Najwa yang menjadi sorotan publik, yaitu bertema "Undang-Undang Cipta Kerja". Pembahasan narasi tersebut mengenai RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh pemerintah yang menimbulkan pro dan kontra. Mengingat banyak masyarakat yang membaca ataupun mendengar suatu wacana tanpa memikirkan bahasa dalam wacana tersebut akan memengaruhi kondisi masyarakat. Sehingga, perlu diteliti bagaimana sebenarnya masyarakat memandang suatu masalah tersebut. Hal itu dibuktikan oleh teorinya Eryanto yang mengatakan bahwa wacana adalah bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat. Jadi, perlu meneliti bagaimana wacana diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat.

Analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi bahasa. Kita menggunakan bahasa dalam berkesinambungan atau untaian wacana (Tarigan, 2009:23). Wacana oleh van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi atau bangunan: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dimensi teks yang pertama, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan

aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah (Eriyanto, 2011:224).

Konteks sosial melihat bagaimana teks itu dihubungkan lebih jauh dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat atas suatu wacana. Menurut Van Dijk ada dua poin penting, yaitu (1) Praktik kekuasaan, Van Dijk mendefinisikan kekuasaan melibatkan *kontrol*, yaitu oleh (anggota dari) satu kelompok atas (orang-orang dari) kelompok lain. Kontrol tersebut mungkin berkaitan dengan *tindakan* dan *pengertian*, artinya kelompok yang kuat dapat membatasi kebebasan bertindak orang lain, tetapi juga memengaruhi pikiran mereka. Selain cara dasar untuk memaksa secara langsung mengontrol tindakan (seperti dalam kekerasan polisi terhadap demonstran atau kekerasan laki-laki terhadap perempuan) (Van Dijk, 1993:254). (2) Akses memengaruhi, yaitu analisis wacana Van Dijk, memberi perhatian yang besar pada akses, bagaimana akses diantara masing-masing kelompok dalam masyarakat. Kelompok elite mempunyai akses yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak berkuasa. Oleh karena itu, mereka yang lebih berkuasa mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mempunyai akses pada media, dan kesempatan lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran khalayak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah (1) Praktik kekuasaan pada Mata Najwa “Undang-Undang Cipta Kerja” di *Channel Youtube* Najwa Shihab. (2) Akses memengaruhi pada Mata Najwa “Undang-Undang Cipta Kerja” di *Channel Youtube* Najwa Shihab. Penelitian ini secara umum untuk mengkaji Mata Najwa “Undang-Undang Cipta Kerja” di *Channel Youtube* Najwa Shihab dengan teori analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk pada konteks sosial. Manfaat dari penelitian ini, yaitu seiring berkembangnya teknologi dan informasi, diharapkan dapat dengan bijak memilah dan memilih informasi yang realita atau dapat dipercaya sehingga dapat berpikir terbuka atas suatu masalah.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji Mata Najwa “Undang-Undang Cipta Kerja”, yaitu penelitian kualitatif. Data yang terkumpul berupa

paparan narasi atau pernyataan dialog dalam program Mata Najwa “Undang-Undang Cipta Kerja” di *Channel Youtube* Najwa Shihab. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah video Mata Najwa “Undang-Undang Cipta Kerja” di *Channel Youtube* Najwa Shihab. Objek dalam penelitian ini adalah konteks sosial dalam *Channel Youtube* Najwa Shihab dengan menggunakan teori Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk.

Teknik pengumpulan data, yaitu observasi data, transkrip video, pembacaan data, pemberian tanda, dan tabulasi data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber dari video Mata Najwa Edisi “Undang-Undang Cipta Kerja” yang disiarkan secara langsung 7 dan 14 Oktober 2020, kemudian diunggah ulang di *channel youtube* Najwa Shihab. Pada tanggal 7 oktober 2020 yang dimoderatori oleh Najwa Shihab.

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu (1) Peneliti melakukan pembacaan ulang data-data yang telah ditandai secara menyeluruh. (2) Tahap ini digunakan untuk mendeskripsikan data mana yang termasuk praktik kekuasaan dan akses memengaruhi. (3) Peneliti menganalisis dan menafsirkan dari data yang diperoleh. (4) Tahap terakhir ini, peneliti melakukan penyimpulan dengan cara mempertegas kembali data yang sesuai dengan rumusan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Praktik Kekuasaan Pada Mata Najwa “Undang-Undang Cipta Kerja”**

Keadaan masyarakat saat disahkannya undang-undang cipta kerja tentunya ada yang pro dan kontra. Hal ini mengharuskan masyarakat dengan cermat memaknai segala sesuatu agar tidak menimbulkan prasangka atas suatu masalah, misalnya narasi yang membahas “Undang-Undang Cipta Kerja”. Pembicara dapat saja memengaruhi kesadaran khalayak melalui bahasa yang digunakannya.

#### **a. Kekuasaan Bersifat Persuasif**

##### **Data 1:**

**“Bang Supratman kalau Anda katakan ini dilakukannya sudah transparan, terbuka tetapi kenapa bahkan anggota DPR sendiri ada yang terkaget-kaget ketika melihat hasil dari undang-undang yang**

**digarap ini, misalnya ketua komisi sepuluh kaget.** Kenapa ada pasal yang tadinya sudah disepakati tidak masuk tiba-tiba ada lagi.” (MRCP/D1/P3/1:56/KBP).

Konteks: Najwa Shihab selaku moderator dengan nada tegas menanggapi pernyataan dari Supratman yang mengatakan bahwa *omnibus law* disahkan dengan transparan dan terbuka.

Kutipan data (1) yang dicetak tebal termasuk penanda kalimat yang menunjukkan kekuasaan persuasif. Ditunjukkan dengan kalimat “Bang Supratman kalau Anda katakan ini dilakukannya sudah transparan, terbuka tetapi kenapa bahkan anggota DPR sendiri ada yang terkaget-kaget ketika melihat hasil dari undang-undang yang digarap ini, misalnya ketua komisi sepuluh kaget”. Kekuasaan ini menekankan atau memengaruhi pemikiran seseorang atas dasar pernyataan sikap terkaget-kaget yang ditunjukkan oleh anggota DPR ketika melihat hasil dari undang-undang cipta kerja. Anggota DPR yang memiliki kekuasaan saja kaget dengan pengesahan *omnibus law*, apalagi dengan rakyat biasa. Secara tidak langsung bahasa yang digunakan Najwa, akan membuat masyarakat berpikir bahwa pengesahan *omnibus law* memang tidak terbuka.

Kekuasaan bersifat persuasif, yaitu tindakan secara tidak langsung mengontrol dengan jalan memengaruhi kondisi mental berupa pengetahuan yang ditunjukkan pada data berikut.

#### **Data 2:**

“Iya, itu sebetulnya kecurangan proses legislasi. Kenapa? **Sejak awal tidak memenuhi prinsip-prinsip tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Kita punya aturan hukum, aturan main soal itu. Salah satunya soal harus berkonsultasi, naskah akademisnya harus ada.** Mengukur problem sosiologi atau mengukur nilai yang harus dijalani dan itu harus turun ke masyarakat. Itu harus ketemu dengan para ahli dan harus membagi-bagikan naskahnya atau idenya mengambil dari masyarakat. Yang terjadi adalah sampai beberapa bulan yang lalu, sejak mulai diluncurkan ide bahwa akan ada *omnibus law*, yang muncul adalah ketertutupan.” (MRCK/D2/P1/05:37/KBP).

Konteks: Haris menjawab pertanyaan dari moderator terkait pernyataan yang dilontarkan, yaitu kecurangan legislasi. Haris menyampaikan

pendapatnya dengan tegas bahwa memang ada ketertutupan negara soal *omnibus law*.

Kutipan data (2) yang dicetak tebal termasuk penanda kalimat yang menunjukkan kekuasaan bersifat persuasif. Ditunjukkan dengan kalimat “Sejak awal tidak memenuhi prinsip-prinsip tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Kita punya aturan hukum, aturan main soal itu. Salah satunya soal harus berkonsultasi, naskah akademisnya harus ada”. Haris Azhar sebagai Direktur Eksekutif Lokataru memengaruhi mental masyarakat dengan pengetahuan yang ada bahwa negara kita mempunyai aturan hukum. Setiap perbuatan atau tindakan ada aturannya masing-masing dan tidak boleh seenaknya sendiri. Seperti halnya pengesahan undang-undang cipta kerja yang tidak memenuhi prinsip-prinsip tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini akan memengaruhi masyarakat bahwa pengesahan undang-undang cipta kerja dilakukan secara tertutup.

#### **b. Kepemilikan Sumber Bernilai**

Kekuasaan ini umumnya didasarkan pada kepemilikan atas sumber-sumber yang bernilai, seperti status atau jabatan, ditunjukkan pada data di bawah ini.

##### **Data 3:**

**“Jadi, mudah kami saling mengkonfirmasi jangan lupa saya sebagai ketua Panja bahkan mempercayakan kepada Mbak Ledia bersama dengan Pak Andreas untuk secara dengan teliti betul. Karena saya tau mbak Ledia itu orangnya detil jangan sampai ada penyelundupan-penyelundupan pasal ataupun penyelundupan norma.”** (MRCK/D5/P1/09:47/KBK).

Konteks: Supratman sebagai ketua Panja menjawab pernyataan atau tuduhan yang menyatakan bahwa *omnibus law* tidak terbuka dan kecurangan lesgilasi.

Kutipan data (3) yang dicetak tebal termasuk penanda kalimat yang menunjukkan kekuasaan kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang. Ditunjukkan dengan kalimat “Jadi, mudah kami saling mengkonfirmasi jangan lupa saya sebagai ketua Panja bahkan mempercayakan kepada Mbak Ledia bersama dengan Pak Andreas untuk secara dengan teliti betul. Bahasa yang digunakan oleh Supratman mencerminkan bahwa dia memiliki

kekuasaan sebagai ketua Panja, yaitu mengontrol dan mengkonfirmasi pengesahan undang-undang cipta kerja agar teliti, karena tidak semua pihak dapat ikut dalam pengesahan undang-undang cipta kerja tersebut. Hal ini dikarenakan, Supratman merupakan ketua Panja sehingga memiliki kekuasaan sebagai koordinasi pengesahan undang-undang cipta kerja.

Kekuasaan ini berdasarkan atas sumber-sumber yang bernilai, yaitu berupa status. Ditunjukkan pada data berikut ini.

**Data 4:**

“Nanti tinggal dicek undang-undangnya kan sudah dikirim ke pemerintah hari ini. **Presiden akan memeriksanya lagi, apakah draft yang dikirim itu yang sudah diputus itu betul-betul akurat dan tepat sesuai dengan yang di informasi dimiliki oleh pemerintah, baru diundang-undangkan dan diletakkan di lembaran negara lalu dia menjadi undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara.**” (CKFD/D10/P4/3:43/KBK)

Konteks: Pernyataan dari Johnny Plate saat ditanya Najwa terkait rujukan mengatakan adanya hoax dalam undang-undang cipta kerja. Johnny menyampaikan dengan tegas bahwa pemerintah teliti betul terkait keakuratan *omnibus law* sebelum disahkan.

Kutipan data (4) yang dicetak tebal termasuk penanda kalimat menunjukkan adanya kepemilikan, yaitu status. Ditunjukkan dengan kalimat “Presiden akan memeriksanya lagi, apakah draft yang dikirim itu yang sudah diputus itu betul-betul akurat dan tepat sesuai dengan yang di informasi dimiliki oleh pemerintah, baru diundang-undangkan dan diletakkan di lembaran negara lalu dia menjadi undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara”. Presiden memiliki kekuasaan atas pengesahan undang-undang. Kekuasaan presiden, yaitu memeriksa dengan akurat sebelum mengesahkan undang-undang *omnibus law*. Membuktikan bahwa presiden berkuasa atas negara yang dipimpinnya.

## **2. Akses Memengaruhi Wacana Pada Mata Najwa “Undang-Undang Cipta Kerja”**

Fokus penelitian yang kedua, yaitu akses memengaruhi wacana. Akses memengaruhi wacana merupakan kelompok elite yang mempunyai akses lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak berkuasa. Akses

yang mungkin dimiliki seseorang atau kelompok, yaitu akses perencanaan, akses wacana *setting*, akses mengontrol komunikasi, dan akses kontrol khalayak. Berikut akan dipaparkan data beserta penjelasannya.

#### a. Akses Perencanaan

##### Data 5:

“Tapi bahkan ketua baleg sendiri mengakui ada penghapusan dan penambahan kata dalam dan ayat pada naskah yang dikirimkan kepada Presiden. **Pengakuan itu muncul dalam konferensi pers kemarin, pak ketua baleg berdiri di samping Anda ketika bilang ada perubahan.**” (CKFD/D14/P1/6:44/APR).

Konteks: Pernyataan dari Najwa atas pembicaraan Aziz yang mengatakan tidak ada perubahan dalam *omnibus law*. Najwa menyatakan dengan tegas bahwa ada pengakuan perubahan dalam *omnibus law* ketika konferensi pers.

Kutipan data (5) yang dicetak tebal termasuk penanda kalimat menunjukkan adanya akses perencanaan konferensi pers. Ditunjukkan dengan kalimat “Pengakuan itu muncul dalam konferensi pers kemarin, pak ketua baleg berdiri di samping Anda ketika bilang ada perubahan”. Pemerintah atau DPR di sini memiliki akses dalam mengadakan konferensi pers mengenai pengesahan *omnibus law* kepada publik. Anggota baleg mempunyai akses lebih besar dalam mengadakan konferensi pers daripada masyarakat atau buruh dalam polemik undang-undang cipta kerja yang baru saja disahkan.

Akses perencanaan, yaitu inisiatif untuk mengadakan komunikasi. Pemerintah atau anggota DPR mempunyai inisiatif untuk mengkomunikasikan polemik undang-undang cipta kerja kepada publik dengan menyediakan media. Ditunjukkan pada data berikut.

##### Data 6:

**“Kewajiban kami menyediakan medianya untuk publik bisa akses, yang kedua kami menyediakan seluruh anggota Panja untuk mengkomunikasikannya kepada publik.** Publik baik melalui media sosial maupun pernyataan semua lembaga-lembaga kami dengar semuanya dan itu yang kami perjuangkan untuk masuk di dalam *omnibus!*” (MRCK/D16/P3/3:59/APR).

Konteks: Pernyataan dari Supratman ketika ditanya Najwa tentang keterbukaan kepada masyarakat dalam mengakses *omnibus law*. Supratman menyampaikan dengan tegas bahwa pemerintah sudah berinisiatif melakukan keterbukaan dengan konsultasi publik.

Kutipan data (6) yang dicetak tebal termasuk penanda kalimat menunjukkan akses perencanaan. Ditunjukkan dengan kalimat “Kewajiban kami menyediakan medianya untuk publik bisa akses, yang kedua kami menyediakan seluruh anggota Panja untuk mengkomunikasikannya kepada publik”. Pemerintah atau anggota DPR mempunyai akses lebih besar untuk mengadakan konsultasi publik mengenai polemik undang-undang cipta kerja. Bahasa yang digunakan oleh Supratman menggambarkan keterbukaan yang dilakukan pemerintah kepada publik untuk mengkomunikasikan polemik yang ada tentang *omnibus law*.

#### **b. Akses Wacana Setting**

*Setting* di sini menyangkut *person* yang menyelenggarakan wacana. Pemerintah lebih memiliki akses dalam penyusunan undang-undang, ditunjukkan pada data di bawah ini.

#### **Data 7:**

**“Saya tidak ingin mencampuri urusan penyusunan undang-undang karena ini adalah inisiatif pemerintah. Jadi, itu wilayahnya domain pemerintah untuk menjelaskan itu.** Kami di badan legislasi di tingkat Panja itu, terkait dengan pembahasan.” (MRCK/D18/P1/7:39/AWS).

Konteks: Pernyataan dari Supratman ketika menanggapi tuduhan Haris bahwa *omnibus law* ini adalah kecurangan legislasi. Supratman menyatakan dengan tegas bahwa penyusunan undang-undang adalah inisiatif pemerintah.

Kutipan data (7) yang dicetak tebal termasuk akses wacana *setting*. Ditunjukkan dengan kalimat “Saya tidak ingin mencampuri urusan penyusunan undang-undang karena ini adalah inisiatif pemerintah. Jadi, itu wilayahnya domain pemerintah untuk menjelaskan itu”. Bahasa yang dituturkan Supratman, yaitu Pemerintah memiliki akses lebih dalam kekuasaan untuk penyusunan undang-undang dan menjelaskan soal

penyusunan tersebut. Sedangkan, anggota Panja hanya terkait pembahasan undang-undangnya saja.

*Setting* menyangkut *person* yang menyelenggarakan wacana. Kominfo mempunyai akses lebih dalam mengkategorikan mana yang hoax. Ditunjukkan pada data berikut ini.

**Data 8:**

**“Iya jelas Nana! Jelas sekali dong! Tugas Kominfo menurut undang-undang ITE itu mengkategorikan itu amanat undang-undang.** Lalu terkait dengan substansinya, memang saya sudah menyampaikan untuk kementerian supaya mau debat detail ya, debatlah dengan menteri sektor masing-masing.” (CKFD/D23/P5/1:50/AWS).

Konteks: Pernyataan dari Johnny saat diminta menanggapi apakah pemerintah benar-benar membaca draft versi RUU dan berani berdebat soal tuduhan hoax.

Kutipan data (8) yang dicetak tebal termasuk penanda kalimat yang menunjukkan akses wacana setting, yaitu person penyelenggara wacana. Ditunjukkan dengan kalimat “Iya jelas Nana! Jelas sekali dong! Tugas Kominfo menurut undang-undang ITE itu mengkategorikan itu amanat undang-undang”. Bahasa yang digunakan Johnny sebagai Menkominfo menggambarkan bahwa Kominfo mempunyai akses lebih dalam mengkategorikan mana yang hoax dan tidak.

**c. Akses Mengontrol Komunikasi**

Kontrol di sini berhubungan dengan kontrol siapa yang boleh berbicara, topik apa yang bisa didiskusikan, dan kapan harus mengatakan. Najwa mempunyai akses untuk membahas topik apa dan siapa yang berbicara. Ditunjukkan pada data berikut.

**Data 9:**

“Bang Supratman, Bang Haris Azhar! Saya minta untuk tenang dulu, karena saya tidak akan mematikan mix Anda berdua, karena berhak untuk ngomong. **Saya juga yang mengundang Anda, tetapi saya ingin meminta sekarang tanggapan dari Mbak Ledia yang juga badan legislasi DPR tetapi yang justru menolak yang pada akhirnya menolak undang-undang ini! Silakan Mbak Ledia!**” (MRCK/D29/P2/5:48/AMK).

Konteks: Tanggapan Najwa ketika Supratman dan Haris saling mempertankan argumentasinya.

Kutipan data (9) yang dicetak tebal termasuk akses mengontrol komunikasi yang dilakukan oleh Najwa. Ditunjukkan dengan kalimat “Saya juga yang mengundang Anda, tetapi saya ingin meminta sekarang tanggapan dari Mbak Ledia yang juga badan legislasi DPR tetapi yang justru menolak yang pada akhirnya menolak undang-undang ini! Silakan Mbak Ledia”. Najwa mempunyai akses dalam mengontrol komunikasi karena Ia sebagai tuan rumah dalam acara Mata Najwa. Najwa mengatur siapa yang boleh berbicara untuk menanggapi topik tersebut.

Kontrol komunikasi dilakukan oleh Najwa, yaitu siapa yang boleh menanggapi dan topik apa yang dibahas. Najwa meminta Aziz untuk memberi tanggapan tentang apakah berani menjamin sumpah jabatan bahwa tidak ada perubahan substansi. Ditunjukkan pada data berikut.

**Data 10:**

“Kami konfirmasi juga ke DPR dan mengatakan ya dan soal perubahan kami juga mendapatkan konfirmasi dari Sekjen Kemenag yang tim yang terlibat dalam proses pembahasan setelah diketok dan mengatakan iya ada perubahan. Jadi kami konfirmasi ke beberapa pihak. **Saya ingin minta ke Pak Aziz Syamsudin, Apakah Anda masih tetap menjamin tidak ada perubahan melihat apa yang sudah terpampang malam ini Anda masih berani untuk menjamin sumpah jabatan tidak ada perubahan substansi?”** (CKFD/D30/P2/9:10/AMK).

Konteks: Najwa meminta tanggapan dari Aziz atas jaminan sumpah jabatan tentang pengakuan tidak ada perubahan substansi.

Kutipan data (10) yang dicetak tebal termasuk penanda kalimat menunjukkan akses mengontrol komunikasi. Ditunjukkan dengan kalimat “Saya ingin minta ke Pak Aziz Syamsudin, Apakah Anda masih tetap menjamin tidak ada perubahan melihat apa yang sudah terpampang malam ini Anda masih berani untuk menjamin sumpah jabatan tidak ada perubahan substansi?”. Najwa sebagai tuan rumah Mata Najwa mempunyai akses lebih mengontrol komunikasi, yaitu siapa yang boleh berbicara dan membahas topik apa. Najwa meminta tanggapan Aziz terkait pengakuannya tentang tidak ada perubahan substansi dalam undang-undang cipta kerja.

#### d. Akses Kontrol Khalayak atas Wacana

Akses kontrol wacana atas khalayak ditunjukkan oleh Haris Azhar selaku Direktur Eksekutif Lokataru. Haris mengontrol dengan cara mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan penolakan terhadap *omnibus law*. Ditunjukkan data sebagai berikut.

##### Data 11:

**“Tadi saya sampaikan begini, teruslah bergerak di jalanan ya masyarakat adat, buruh, anak muda yang sangat tergantung dan terancam dengan *omnibus law* ini harus bergerak baru nanti tekanan itu bisa dikondisikan lewat *judicial review* yang akan dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Tapi jangan mensimplifikasi, jangan demo, tangkapin mereka *diinstallin*, *direpresi* oleh polisi, dan oleh intelijen terus disuruhnya ke Mahkamah Konstitusi.”** (MRCK/D33/P7/1:20/AKW).

Konteks: Pernyataan dari Haris ketika ditanya Najwa memaknai suara-suara publik atas penolakan *omnibus law*. Haris menyatakan dengan tegas mengajak masyarakat untuk menyuarakan penolakan pengesahan *omnibus law* bagi mereka yang merasa terancam.

Kutipan data (11) yang dicetak tebal termasuk akses kontrol wacana atas khalayak. Ditunjukkan dengan kalimat “Tadi saya sampaikan begini, teruslah bergerak di jalanan ya masyarakat adat, buruh, anak muda yang sangat tergantung dan terancam dengan *omnibus law* ini harus bergerak baru nanti tekanan itu bisa dikondisikan lewat *judicial review* yang akan dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Haris Azhar sebagai Direktur Eksekutif Lokataru mempunyai akses untuk mengontrol dengan cara mengajak masyarakat terus menyuarakan atas penolakan undang-undang cipta kerja. Karena dengan adanya *omnibus law* banyak masyarakat yang merasa terancam. Bahasa yang digunakan oleh Haris menunjukkan penolakan terhadap *omnibus law* dan terang-terangan mengajak masyarakat.

##### Data 12:

**“Jadi, aktor itu ada aktor yang baik. Aktor yang baik itu adalah serikat buruh yang dengan tulus memang mau memperjuangkan hak-hak buruh itu saya minta polisi itu dilindungi habis-habisan itu. Tapi kan kemudian ada kekacauan dimana-mana, ada yang melempar polisi dengan**

botol, ada yang menari-menari depan polisi agar polisinya emosi, ada yang ketangkap membawa ketapel, membawa batu, membawa parang, dan sebagainya, itu kemudian ada yang membakar.” (CKFD/D36/P6/10:50/AKW).

Konteks: Pernyataan Mahfud atas pertanyaan dari Najwa terkait aktor-aktor dalang demo penolakan undang-undang cipta kerja.

Kutipan data (12) yang dicetak tebal termasuk penanda kalimat menunjukkan akses kontrol wacana atas khalayak. Ditunjukkan dengan kalimat “Aktor yang baik itu adalah serikat buruh yang dengan tulus memang mau memperjuangkan hak-hak buruh itu saya minta polisi itu dilindungi habis-habisan itu”. Mahfud sebagai Menkopolhukan mempunyai akses lebih besar untuk mengatur ketidakadilan hukum. Bahasa yang dituturkan oleh Mahfud memperlihatkan bahwa Ia tetap menyuruh polisi melindungi peserta aksi demo agar tidak ricuh. Hal tersebut mengubah pemikiran masyarakat terkait polisi yang semena-mena dan kasar terhadap peserta aksi demo.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian “Konteks Sosial Teun A. Van Dijk pada Mata Najwa Undang-Undang Cipta Kerja di *Channel Youtube* Najwa Shihab”. Peneliti dapat menyimpulkan konteks sosial yang ada pada narasi Mata Najwa menunjukkan adanya praktik kekuasaan pada Mata Najwa “Undang-Undang Cipta Kerja”, yaitu kekuasaan berupa status, pengetahuan, dan sikap yang bersifat persuasif. Pemerintah atau Panja mempunyai kekuasaan berupa memeriksa atau meneliti, mengontrol, dan mengkonfirmasi Undang-Undang Cipta Kerja sebelum disahkan. Tidak semua pihak dapat ikut dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Bahasa yang digunakan pembicara menunjukkan adanya akses memengaruhi kepada publik karena pemerintah dan anggota baleg merupakan kelompok yang berkuasa. Panja dan Kesekjenan lebih mempunyai akses dalam bidang pengkajian Undang-Undang Cipta Kerja. Saran, dengan danya penelitian menggunakan analisis wacana kritis diharapkan dapat menumbuhkan sikap kritis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat terkait bagaimana mengkritisi suatu masalah atau prasangka dengan sikap terbuka.

## DAFTAR RUJUKAN

- Eriyanto. 2011. *Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media)*. Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tarigan, Henry Guntur. 2009. *Pengajaran Wacana*. Bandung: Angkasa.
- Van Dijk, T. A. 1993. *Principles of critical discourse analysis*. University of Asmterdam, Vol 4(2): 249- 283. (<https://doi.org/10.1177/0957926593004002006>), diunduh 11 Januari 2021.